



## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 1662/KA/01/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Perubahan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional  
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

28 Januari 2021

Yth.

1. Para Pimpinan Lembaga Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
3. Jaksa Agung Republik Indonesia
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural
6. Para Gubernur seluruh Indonesia
7. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia

di tempat

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Instansi Pembina JF PPBJ mengusulkan peningkatan kelas jabatan JF PPBJ melalui surat Kepala LKPP Nomor: 4089/KA/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 kepada Menteri PANRB. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri PANRB telah menyetujui peningkatan kelas Jabatan JF PPBJ melalui surat Menteri PANRB Nomor: B/1392/M.SM.04.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan Bagi JF PPBJ (terlampir). Perubahan kelas jabatan JF PPBJ adalah sebagai berikut:

Jenjang JF PPBJ	Kelas Jabatan Lama (Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2017)	Kelas Jabatan Perubahan (Baru)
Pengelola PBJ Ahli Pertama	8	8
Pengelola PBJ Ahli Muda	9	10
Pengelola PBJ Ahli Madya	11	12

2. Perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menggunakan JF PPBJ.
3. Menindaklanjuti perubahan kelas jabatan tersebut, kami harapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kenaikan tunjangan kinerja bagi Pengelola PBJ yang ada di instansi masing-masing sesuai kelas jabatan baru dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : G1wjat  
Nomor Tiket : SK202101280001

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala LKPP,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Roni Dwi Susanto

Tembusan :

Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

**Token** : G1wjat

**Nomor Tiket** : SK202101280001



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 1392 /M.SM.04.00/2020 30 Desember 2020  
Lampiran : -  
Hal : **Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan bagi JF  
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

Yth. **Bapak Kepala LKPP**  
Di  
Jakarta

Sesuai Surat Kepala LKPP nomor 4089/KA/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 hal: Penyusunan Informasi Faktor Jabatan dalam Rangka Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
2. LKPP merupakan instansi pembina jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah menyampaikan usulan perubahan kelas jabatan untuk JF dimaksud sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/458/M.SM.04.00/2020, hal: Mekanisme Penyusunan Informasi Faktor Jabatan untuk Evaluasi Jabatan Fungsional.
3. Usulan kelas jabatan fungsional tersebut di atas telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan 3 di atas, dengan ini disampaikan persetujuan penetapan perubahan kelas jabatan bagi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan akan dipergunakan untuk seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional ini.

Dalam rangka tertib administrasi, kami harap pengisian JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditindaklanjuti dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. Di samping itu harus dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi serta tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Tjahjo Kumolo

Tembusan:  
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran I  
Nomor: B/ 1392 /M.SM.04.00/2020  
Tanggal 30 Desember 2020

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

No.	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	143
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	1094
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	1082

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi,**



**Tjahjo Kumolo**

Lampiran II

Nomor: B/ 1392 /M.SM.04.00/2020

Tanggal 30 Desember 2020

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JAB.	NILAI JAB.	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	2220	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	4	110	2	50	1	5	1	5
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	1695	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5

Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi,



Tjahjoe Kumolo